

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I MENGULIK INDUSTRI ALKOHOL DESA BEKONANG.....	1
1.1. Pintu Gerbang Industri Alkohol Bekonang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Landasan Teori.....	6
1.4.1. Kebijakan Publik	6
1.4.2. Implementasi Kebijakan Publik	11
1.4.3. Instrumen Kebijakan Publik.....	18
1.5. Tinjauan Pustaka	20
1.6. Metodologi Penelitian.....	25
1.6.1. Jenis Penelitian	25
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26

1.6.3. Studi Naskah Kebijakan.....	29
1.6.4. Studi Pustaka.....	29
1.6.5. Jenis dan Sumber Data.....	30
1.6.6. Teknik Analisis Data	31
1.7. Sistematika Penulisan	34
BAB II POLITIK MINUMAN BERALKOHOL DARI MASA KE MASA.36	
2.1. Lokasi dan Kehidupan Sosial Desa Bekonang	36
2.2. Jejak Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia.....	38
2.3. Perkembangan Ciu Bekonang: Konflik Swasta dan Campur Tangan Pemerintah.....	41
2.4. Paguyuban Bekonang, Paguyuban Simbolis.....	43
2.5. Ciu Bekonang bagi Masyarakat: Lebih dari Motif Ekonomi.....	44
2.6. Ilegalitas Ciu Bekonang: Berlingungnya Perajin di Balik Legalitas Etanol	47
BAB III DILEMA PEMERINTAH DALAM IDENTIFIKASI REPRESENTASI MASALAH	51
3.1. Representasi Masalah	51
3.1.1. Ciu Bekonang sebagai Permasalahan Ketertiban	52
3.1.2. Ciu Bekonang sebagai Permasalahan Kepatuhan	53
3.2. Asumsi Representasi Masalah	54
3.2.1. Key Concepts: Pengawasan dan Pengendalian	54
3.2.2. Binaries: Legalitas VS Ilegalitas	55
3.3. Proses Penampilan Representasi Masalah	56
3.4. Kesenyapan Representasi Masalah	59
3.5. Efek Representasi Masalah	61
3.5.1. Discursive Effects.....	61

3.5.2. Subjectification Effects	62
3.5.3. Lived Effects	64
3.6. Produksi dan Disrupsi Representasi Masalah	65
3.7. Kesimpulan	69
BAB IV UPAYA OPTIMALISASI INSTRUMEN KEBIJAKAN BESERTA TANTANGAN IMPLEMENTASI.....	71
4.1. Faktor-Faktor dalam Instrumen Kebijakan.....	71
4.1.1. Faktor Informasi	71
4.1.2. Faktor Kewenangan	74
4.1.3. Faktor Alokasi Dana.....	80
4.1.4. Faktor Desain Tata Organisasi	82
4.2. Tantangan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam Implementasi Kebijakan.....	91
4.2.1. Mengakarnya Pola Pikir Masyarakat.....	91
4.2.2. Tumpang Tindih Kewenangan dan Lemahnya Koordinasi	93
4.2.3. Keterbatasan Wilayah dan Jam Operasional Kerja.....	95
4.2.4. Kurangnya Motivasi Pejabat Pelaksana.....	97
4.3. Kesimpulan	97
BAB V PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Rekomendasi Kebijakan	104
5.3. Refleksi Teoritis	105
DAFTAR PUSTAKA.....	109